

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Chomzah, H. Ali Achmad. 2002.*Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Harsono, Boedi. 2001.*Aspek Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia*, Seri IV, Jakarta, BPN Proyek P2HT.
- _____. 2003. *Hukum Agraria Di Indonesia Sejarah Pembentukannya Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan.
- _____. 2003.*Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Syarief, Elsa. 2012.*Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Gramedia.
- Soesangobeng, Herman. 2001.*Materi Perkuliahan Hukum Agraria Lanjutan*, Jakarta: Program S2 Magister STIH "IBLAM".
- Sumarjono, Maria SW. 2008.*Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sitorus, Oloan dan H.M.Zaki Sierrad. 2006.*Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar Dan Implementasi*, Yogyakarta : Mitra Kerja Tanah Indonesia.
- Sitorus, Oloandan Nomadyawati. 1995.*Hak Atas Tanah dan Kondominium, Suatu Tinjauan Hukum*, Jakarta: Dasamedia Utama.
- Zein, Ramli. 1995.*Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang *Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Badan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peranturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peranturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

